

Kamaruddin (2004:81) mengemukakan bahwa analisis teknikal sebagai analisis pasar atau sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menentukan perhatian pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menentukan pola yang mungkin dapat memprediksikan dari gambaran yang telah dibuat.

Suad Husnan (1998:367) mengemukakan bahwa analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk ke pasar) atau menjual saham (keluar dari pasar), dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis maupun menggunakan analisis grafis.

Sawidji Widoatmodjo (2005:77) mengatakan bahwa analisis teknikal mengamati pembentukan grafik harga dengan berbagai varian yang memungkinkan terjadi dibandingkan dengan perilaku harga sebelumnya. Tujuan pokok mengamati grafik adalah :

- a) Secepat mungkin menemukan kecenderungan harga.
- b) Memperkirakan kemungkinan waktu dan jarak kecenderungan itu.
- c) Memilih saat yang paling menguntungkan untuk masuk dan keluar pasar.

Dari beberapa definisi dan informasi mengenai analisis teknikal, dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal merupakan analisis terhadap pola pergerakan harga di masa lampau dengan

tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa yang akan datang. Analisis teknikal banyak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kapan membeli atau menjual saham (*sell or buy decision*).

Analisis pasar atau sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks saham, harga atau statistic pasar lainnya dalam menentukan pola yang mungkin dapat memprediksikan dari gambaran yang telah dibuat.

2) Dasar atau Prinsip Analisis Teknikal

Kamaruddin (2004:79) mengemukakan asumsi dasar dalam analisis teknikal yaitu :

- a) Harga pasar ditentukan penawaran dan permintaan.
- b) Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik rasional maupun irrasional.
- c) Harga saham bergerak dalam tren terus menerus dan berlangsung cukup lama, meskipun ada fluktuasi kecil di pasar.
- d) Perubahan tren disebabkan permintaan dan penawaran.
- e) Pergeseran permintaan dan penawaran, tidak menjadi masalah mengapa terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui *chart* transaksi.
- f) Beberapa pola *chart* berulang dengan sendirinya.

Sebelum menggunakan dalam praktek, ada baiknya kita harus mengetahui dasar-dasar atau prinsip dari analisis teknikal

ini. Sawidji Widoatmodjo (2005:78) menyatakan bahwa paling tidak ada tiga prinsip yang bisa digunakan sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal, yaitu :

a) Refleksikan semua kejadian

Segala sesuatu yang terjadi yang bisa mempengaruhi baik yang rasional maupun irrasional sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk. Yang menjadi patokan para analis teknikal adalah “nilai” sesungguhnya suatu mata uang adalah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang tercermin pada kurs mata uang. Para analis tidak memperdulikan apa yang menjadi penyebab perubahan permintaan dan penawaran, misalnya akibat inflasi, melainkan hanya peduli tentang apa yang terjadi pada harga.

b) Tren

Harga bergerak dalam suatu tren, dan tren ini tidak mungkin dimanipulasi. Jika tren memang bergerak ke arah naik, tidak mungkin membuatnya turun, kecuali pada suatu titik tertentu berada di puncak untuk kemudian berbalik arah (*reversal*).

c) Selalu berulang

Aksi pasar (*market action*) selalu berulang. Artinya, para analis teknikal percaya bahwa setiap investor akan mengulangi tindakan yang sama jika kondisi pasar yang

terjadi juga sama. Keadaan ini biasanya dipetakan dalam suatu diagram yang populer dengan sebutan *chart* (sehingga para analis teknikal sering juga disebut sebagai *chartist*).

2.2 Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994: 10). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000: 5). Menurut Zaris, (1987: 82) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Samuelson (1995: 436) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

a. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik

produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik

b. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

c. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

d. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, mengatasi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995: 436-439).

Menurut Sukirno, (1994: 415) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat

pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Menurut Boediono, (1992: 9) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan istilah pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana,2003:3). Selanjutnya, pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu pembangunan merupakan: (1) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terus menerus, (2) usaha untuk meningkatkan tingkat pendapatan perkapita, dan (3) kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sumitro Djojohadikusumo (Sanusi,2004:8), pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Todaro (dalam Arsyad,2004) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya rasa percaya diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Sebelum kita membahas masalah pembangunan ekonomi daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya kita membahas dahulu pengertian daerah (*regional*). Pengertian daerah (*regional*) berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian, yaitu (Arsyad,2004) :

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per

kapitanya, sosial-budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah (Arsyad,2004) adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Tujuan pembangunan yang pertama, untuk pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan (*man made resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini terdapat upaya memadukan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan teknologi dalam rangka memperbesar produktifitas. Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia, besar kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna mencapai pertumbuhan yang tinggi.

Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, yaitu pemerataan yang mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan yang ketiga supaya sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi persyaratan bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan

ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konteks pembangunan daerah pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita atau PDRB per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku karena berguna untuk menggambarkan pertumbuhan perekonomian daerah keseluruhan secara nyata atau riil ekonomi per kapita.

Untuk itu, dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian dari Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah sebagai berikut :

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sector perekonomian disuatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung *netto*. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan

nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan Struktur Ekonomi, maksudnya gambaran perekonomian yang disajikan menurut sektor.

Dalam mendapatkannya, yaitu nilai tambah dari masing-masing sektor dibandingkan dengan jumlah PDRB dan dinyatakan dalam presentase. Dengan melihat angka presentase setiap sektor tersebut, selain dapat diketahui sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, sekaligus juga dapat dilihat struktur perekonomian daerah yang bersangkutan dan pertumbuhan ekonomi, maksudnya untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku.

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu menurut Sukirno (1994:32) dapat digunakan 3 cara perhitungan. Ketiga cara tersebut adalah :

1. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran keatas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh

berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.

3. Cara Pendapatan.

Dalam perhitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB adalah untuk mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian serta membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian (Sukirno (1994:33)), yaitu :

- a. Penilaian atas dasar harga berlaku. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode perhitungan.
- b. Penilaian atas dasar harga konstan. Dalam sistem ini barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan tahun dasar. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam publikasi ini dilakukan dengan menggunakan harga tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Hasil perhitungan PDRB dengan dua sistem penilaian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat ukuran atau skala perekonomian suatu wilayah, dan juga menjadi dasar untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah.

Sementara PDRB atas dasar harga konstan lebih banyak digunakan untuk mengamati perkembangan tingkat produksi dari seluruh inti ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga merupakan data dasar yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

2.4 Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pada dasarnya istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi terdiri dari lapangan pekerjaan yang sudah terisi maupun yang masih belum terisi. Oleh karena data kesempatan kerja secara nyata sulit untuk diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan pekerjaan yang terisi, tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja atau *employed* (Depnaker, 2010).

Berdasarkan konsep Labour Force Approach, Badan Pusat Statistik telah membakukan definisi ketenagakerjaan bahwa kesempatan kerja dapat didekati dengan data penduduk yang bekerja, yaitu penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu, termasuk dalam hal ini mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dikarenakan berbagai sebab.

Kesempatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ketenagakerjaan karena pada hakekatnya setiap manusia memiliki keinginan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila memiliki penghasilan/pendapatan. Keadaan inilah yang mendorong manusia aktif dalam kegiatan ekonomi dan terlibat dalam kesempatan kerja. Penduduk yang telah memasuki usia kerja kemudian adanya tuntutan ekonomi menjadikan mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Pengertian angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan menganggur atau mencari pekerjaan (Depnaker, 2010) masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Angkatan kerja terdiri dari penduduk berusia sepuluh tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja mencakup penduduk berumur sepuluh tahun ke atas yang dalam satu minggu sebelum pencacahan tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan maupun mencari pekerjaan tetapi hanya melakukan kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Sekolah disekolah formal termasuk mereka yang sedang berlibur.
 - b. Mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga dan tidak mendapat upah atau gaji.
 - c. Tidak melakukan kegiatan karena keadaan fisik tidak memungkinkan untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya lumpuh, lanjut usia, cacat mental dan sebagainya.
 - d. Kesempatan kerja yang biasanya digunakan dalam setiap tulisan untuk memberikan pengertian tentang orang bekerja, yang

merupakan terjemahan dari kata “*employment*”. Istilah ini sebenarnya mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari satu kegiatan ekonomi dan produksi. Jadi, kesempatan kerja yang dimaksud disini adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong.

- e. Menganggur atau mencari pekerjaan atau “*Unemployment*” adalah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja. Besarnya tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya efektifitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja dan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya.

Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia, kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka.

Selanjutnya penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Dengan melihat keadaan tersebut maka dalam mengembangkan sektor industri kecil dapat dilakukan dengan menggunakan faktor internal dari industri yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal serta pengeluaran tenaga kerja non upah. Adapun faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Tingkat upah

Upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan sesuai persetujuan, Undang-undang dan peraturan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Istilah Ekonomi, Kompas, 2 Mei 2012).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1984).

Dari Ehrenberg (1998, hal 68) menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunya jumlah

tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah (lembaga penelitian Ekonomi UGM, 1983).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Haryo Kuncoro (2001), dimana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Fungsi upah secara umum, terdiri dari :

1. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan yang lebih produktif.
3. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh

keuntungan dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya.

4. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem perupahan (kompensasi) diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

2) Produktivitas tenaga kerja

Bahwa perencanaan tenaga kerja adalah semua usaha untuk mengetahui dan mengukur masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja dalam satu wilayah pasar kerja yang terjadi pada waktu sekarang dan mendatang, serta merumuskan kebijakan usaha dan langkah yang tepat dan runtut mengatasinya (J. Ravianto, 1989, hal 14). Berdasarkan definisi ini maka proses perencanaan ketenagakerjaan dalam garis besarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah usaha untuk menemukan dan mengukur besarnya masalah kesempatan kerja dan masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan diwaktu yang akan datang. Yang kedua perumusan kebijakan usaha dan langkah-langkah yang tepat dan runtut.

Menurut Muchdansyah Sinungan (1992, hal 29) menyatakan bahwa produktivitas adalah konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber riil yang semakin sedikit dengan produk perusahaan sehingga dikaitkan dengan skill karyawan.

Dari uraian tersebut maka dengan kata lain produktivitas merupakan tolok ukur efisiensi produktif suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan seringkali dibatasi oleh masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dengan satuan fisik, bentuk atau nilai (J. Ravianto, 1989, hal 15)

3) Modal

Modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan kedua-duanya dapat bersifat saling mengganti. Hal ini diperkuat teori Hender Son dan Qiuandt (1986, hal 59) yang dibentuk dalam persamaan $Q = (L,K,N)$, dimana $Q =$ Output, $L =$ Labour, $K =$ Kapital, dan $N =$ Sumber Daya.

Yang dimaksud dengan modal adalah dana yang digunakan dalam proses produksi saja, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang ditempati atau biasa disebut modal kerja (Lembaga Penelitian UGM, 1983).

Masalah modal sering kali disoroti sebagai salah satu faktor utama penghambat produksi dan dengan demikian juga penggunaan tenaga kerja.

4) Pengeluaran Tenaga Kerja Non Upah

Pengeluaran untuk tenaga kerja non upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Permintaan tenaga kerja akan dipengaruhi proporsi pengeluaran untuk tenaga kerja non upah terhadap keseluruhan biaya produksi. Sehingga apabila proporsi biaya tenaga kerja non upah kecil terhadap keseluruhan biaya

produksi, maka responsi terhadap permintaan tenaga kerja kecil. Sebaliknya, apabila proporsi biaya tenaga kerja non upah besar terhadap keseluruhan biaya produksi, maka responsi terhadap permintaan tenaga kerja besar. Apabila proporsi biaya tenaga kerja non upah terhadap keseluruhan biaya produksi meningkat, maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

2.5 Penelitian Sebelumnya

2.5.1 Harjanti (2005)

Dalam penelitian ini, Harjanti mencoba mengestimasi penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga selama periode penelitian (1989-2003). Ternyata bahwa rasio pengeluaran pemerintah per PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio investasi per PDRB dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan. Semakin tinggi rasio investasi per PDRB maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat demikian juga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan peningkatan investasi yang menyebabkan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja, maka pengangguran akan semakin berkurang.

2.5.2 Brata (2005)

Penelitian ini mengenai investasi sektor publik, pembangunan manusia dan kemiskinan, mendapati bahwa dari hasil estimasi dengan menggabungkan data tahun 1996, 1999, dan 2002 diperoleh bukti bahwa investasi sektor public untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat pada berkurangnya tingkat kemiskinan. Variabel lain yang diintroduksikan, yakni investasi swasta dan distribusi pendapatan secara umum berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Investasi swasta berperan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan merugikan upaya pengurangan kemiskinan karena yang terjadi justru peningkatan kemiskinan.

2.5.3 Makmun (2004)

Melakukan pengkajian terhadap pengaruh ketersediaan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah terhadap investasi di sektor industri di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor industri menjadi primadona yang menyerap investasi tidak kurang dari 50%. Menyusul kemudian investasi di sektor perdagangan dan jasa, perumahan,

pariwisata, dan pertanian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh pembentukan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi pada sektor industri dalam periode 1991-2002 cukup signifikan. Signifikannya pengaruh penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. Begitu pula dengan pembentukan nilai tambah bagi investasi yang sudah ada di Kota Batam juga menjadi pertimbangan.

2.5.4 Kim, Sung Tai (1997)

Dalam penelitiannya tentang kasus pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja, rasio investasi swasta terhadap PDRB, rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB, rasio pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak terhadap PDRB.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara angkatan kerja, investasi dan konsumsi pemerintah daerah merupakan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan disparitas pendapatan antar daerah lebih disebabkan oleh sektor swasta (investasi swasta).

2.5.5 De Fretes (2007)

Dalam Penelitian ini menyebutkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Propinsi Papua dilakukan dengan mendorong para investor baik lokal maupun asing untuk melakukan investasi dan diharapkan memberikan peningkatan pendapatan bagi daerah. Sehingga dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pendapatan perkapita masyarakat di Propinsi Papua.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa investasi luar negeri nyata berpengaruh terhadap penyediaan kesempatan kerja dan pendapatan per kapita karena investasi luar negeri lebih terorientasi pada sub sektor kehutanan yang mengolah hasil hutan (industri kayu lapis), sektor pertambangan dan lain-lain yang cukup besar menyediakan kesempatan kerja, sehingga memberikan dampak positif kepada peningkatan pendapatan per kapita. Sedangkan untuk investasi dalam negeri tidak nyata berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan perkapita karena investasi dalam negeri lebih terorientasi pada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja, seperti sub sektor kehutanan (logging), industri kimia, belanja untuk fasilitas umum (sarana dan prasarana), belanja pendidikan dan pengajaran, belanja sekretariat DPRD dan belanja lain-lain.

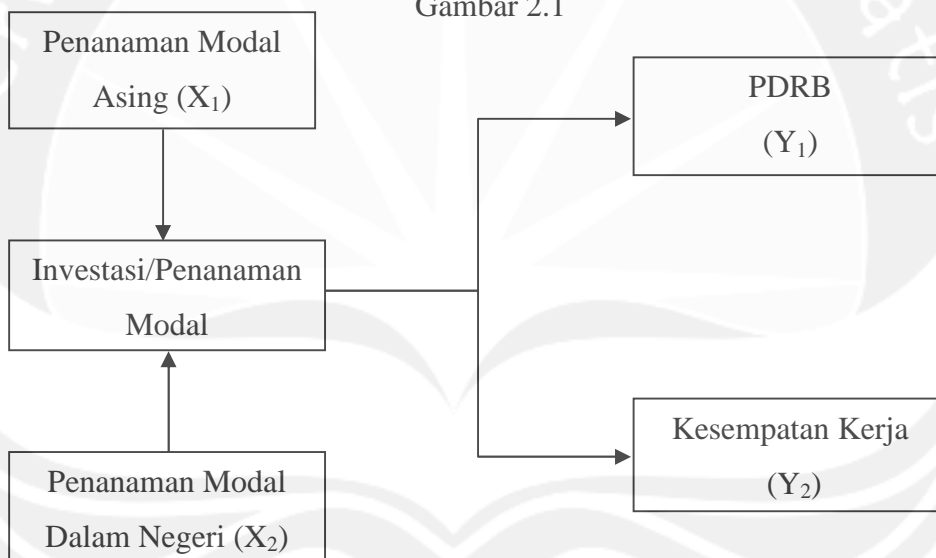
2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga bahwa PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh PMA dan PMDN.

H2 : Diduga bahwa penyediaan kesempatan kerja di Propinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh PMA dan PMDN.

2.7 Kerangka Penelitian



Sumber diadaptasi dari : De Fretes. P (2007;11)